

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIYANTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **764604**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	810.000.000
1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
2. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/212 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	235.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HADIAH Rp. 195.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.640.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	104.419.830
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.172.059.830
III. HUTANG	Rp.	132.142.359
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.039.917.471

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.